

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sekarang yang bisa dirasakan sangat pesat dan sudah semakin maju. Teknologi sudah jadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Perkembangan teknologi sistem informasi berbasis web saat ini sangatlah membantu dan mempermudah segala kinerja bidang keuangan kehidupan terutama pada pengelolaan sistem informasi akuntansi.

Selain Sistem Informasi Akuntansi, sumber daya manusia sangat menentukan untuk keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Maju atau mundurnya perusahaan sangat tergantung dengan sumber daya manusia itu sendiri, sumber daya manusia dalam setiap organisasi baik publik maupun bisnis adalah sumber daya yang paling utama, disamping berbagai sumber daya lainnya. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam suatu perusahaan harus berkualitas agar dapat tercapai tujuan perusahaan. Tercapainya tujuan perusahaan hanya dimungkinkan karena adanya upaya para pelaku yang terdapat dalam perusahaan dapat bekerja dengan baik.

Laporan Keuangan adalah gambaran dari kondisi keuangan sebuah perusahaan maupun sebuah lembaga yang menentukan baik ataupun buruknya sebuah perusahaan ataupun lembaga tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Dapat diketahui bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu instansi pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan lalu lintas, angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memiliki penyusunan program dan kegiatan bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta pengendalian operasional, yang bertujuan untuk menata dan mengelola keberadaan kota serta memelihara keindahan penataan kota secara merata dan bernilai estetis.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di BPTD Wilayah III – Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, didapatkan informasi bahwa pada bidang keuangan ditemukan beberapa masalah yaitu antara lain data informasi yang tidak valid, proses pengolahan data yang memakan waktu cukup lama, sulitnya akses informasi tentang anggaran kegiatan yang disebabkan oleh kantor yang terpisah dan dokumen anggaran yang tidak lengkap, menyebabkan sistem realisasi anggaran kegiatan berjalan tidak optimal. Selain itu, file dan dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran seperti kwitansi pembayaran kegiatan tidak tersimpan dan terkomputerisasi dengan baik. Dari masalah tersebut adanya Sistem Informasi Akuntansi akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan tanpa adanya kesalahan.

Dalam penelitian Ismail & Sasmito Jati Utama (2022) dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis Sistem Informasi Akuntansi yang merupakan aplikasi terintegrasi yang dibuat karena adanya permasalahan pelaporan keuangan instansi telah mampu menjadi inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan komunikasi Pemerintah Pusat dengan seluruh satuan kerja sudah dilaksanakan dengan baik. Dari semua analisis dapat diketahui bahwa keseluruhan pelaksanaan berjalan positif dengan beberapa permasalahan kecil. Kekurangan penelitian ini yaitu manajemen tentang ketersediaan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan pemberian tugas yang menimbulkan tekanan pada diri tiap pegawai.

Oleh karena itu berdasarkan uraian singkat diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dilanjuti

laporan keuangan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, serta memberikan usulan rancangan sistem informasi berbasis web yang berjudul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL (STUDI KASUS : BPTD WILAYAH III – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terhadap sistem informasi akuntansi realisasi anggaran dikemukakan hal-hal yang menjadi permasalahan, antara lain:

- a. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi akuntansi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat agar meningkatkan proses pengolahan data, sulitnya akses informasi tentang anggaran kegiatan, file dan dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran dengan baik ?
- b. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi akuntansi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat menghasilkan laporan keuangan ?

1.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diberikan beberapa hipotesis terhadap permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini mengemukakan:

- a. Diharapkan dengan adanya website ini dapat membantu pencatatan keuangan dan merekap laporan keuangan dengan mudah, cepat dan akurat.
- b. Diharapkan dengan adanya website ini dapat memudahkan admin menghasilkan laporan keuangan dengan rapi dan akurat.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dan agar tidak keluar dari pembahasan yang akan diteliti, maka secara spesifik dipaparkan batasan masalah dari sistem yang akan dibuat sebagai berikut:

- a. Dirancang menggunakan Bahasa Pemrograman PHP disertai Database Mysql dan pembuatan laporan dibantu dengan PDF.
- b. Penelitian ini memiliki pembahasan yang terbatas mencakup laporan keuangan dan realisasi anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan admin dalam menginputkan anggaran keuangan dan menghasilkan laporan keuangan

- b. Membangun aplikasi yang baik sehingga mudah digunakan dan dimengerti oleh admin/pegawai.

1.6 Manfaat Masalah

Penelitian diterapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik yang berkaitan dengan penulisan yang terlihat langsung maupun tidak langsung antara lain:

- a. Manfaat bagi akademik
 - 1. Dapat mengasah dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
 - 2. Memberikan tambahan pengetahuan dalam meneliti suatu permasalahan yang terjadi serta mengatasi masalah yang timbul berikut alternatif pemecahannya.
 - 3. Sebagai referensi bagi peneliti lain, terutama penelitian bidang perancangan atau desain website pribadi, komersial, maupun organisasi.
- b. Manfaat bagi tempat penelitian (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat).
 - 1. Memudahkan admin dalam pengecekan keuangan anggaran maupun laporan keuangan dengan mudah.
 - 2. Perekapan laporan keuangan dan realisasi anggaran menjadi mudah dimengerti dan tersusun rapi.
 - 3. Efisiensi waktu dan tenaga bagi pegawai/admin.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan gambaran umum objek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian. Pada Penelitian ini objek yang akan dijadikan penelitian adalah suatu instansi yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Jalan Adinegoro No.20, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.7.1 Sejarah Objek Penelitian

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD dibentuk pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 dan mulai melaksanakan tugas secara resmi pada tanggal 21 Juli 2017.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu instansi pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

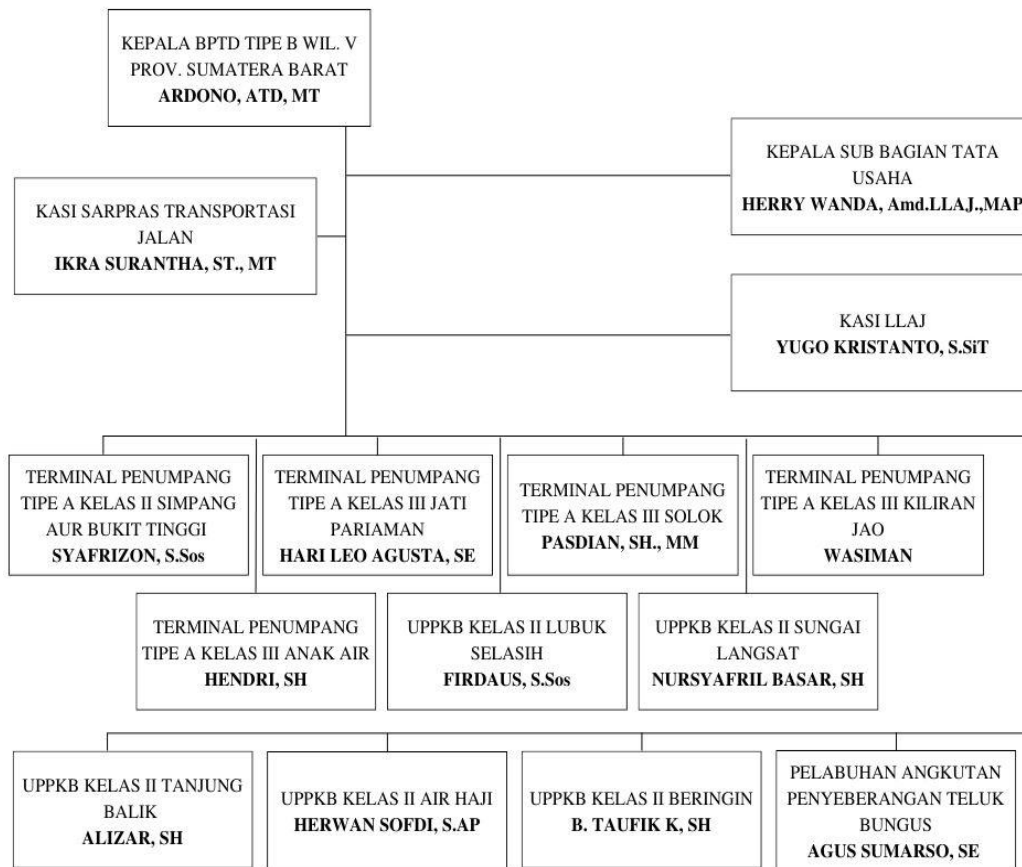
BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 154 Tahun 2016 tentang “Organisasi Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat” yaitu Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat memiliki lingkup kerja di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang tugasnya adalah memastikan keselamatan pengguna jalan di ruas jalan nasional dengan melakukan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, perbaikan lokasi rawan kecelakaan dan memberikan bantuan teknis pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan. Dan menyediakan pergerakan yang teratur dapat tercapai dan terwujud terhadap pengguna jalan Nasional serta harapan BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dapat menurunkan angka kecelakaan dan mendorong paradigma dari masyarakat di Sumatera Barat untuk berperilaku tertib berlalu lintas, tambahanya.

1.7.2 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan maupun badan usaha pada umumnya mempunyai struktur organisasi, penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan kata lain penyusunan struktur organisasi merupakan langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Adapun demi kelancaran dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan berikut adalah struktur organisasi dari BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

(Sumber : BPTD III Wilayah Provinsi Sumatera Barat)

1.7.3 Visi dan Misi BPTD III Wilayah Provinsi Sumatera Barat

A. Visi

Transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung visi presiden 2020-2024 (terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong).

B. Misi

1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia

2. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi darat, sungai, danau, dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mendorong berkembangnya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

1.7.4 Aktivitas Pada Bagian Kepegawaian

Pada penelitian ini diberi kesempatan untuk meneliti di BPTD III Wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Tugas pokok dan fungsi BPTD III sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.